

Model–Model Manajemen Publik

Materi ini membahas berbagai model manajemen public

1. Manajemen publik klasik
2. New Public Management (NPM)
3. Governansi publik.

Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik masing–masing model dan membedakannya berdasarkan fokus, prinsip, dan praktiknya.

Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi negara FISIP Unila



1. Manajemen Publik Klasik

Manajemen publik klasik berkembang pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Fokus utamanya adalah efisiensi, hierarki, dan profesionalisme. Berikut adalah beberapa gerakan penting dalam manajemen publik klasik

Efficiency Drive
(Gerakan Efisiensi)

Downsizing
(Penataan Ulang Organisasi)

In Search of Excellence
(Mencari Keunggulan)

Public Service
(Pelayanan Publik)

1. Manajemen Publik Klasik

A. Efficiency Drive

Efficiency drive adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dalam organisasi publik melalui pendekatan ilmiah dan sistematis. Gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran Frederick Taylor (scientific management) yang menekankan pada:

- Standardisasi: Menetapkan prosedur kerja yang seragam.
- Spesialisasi: Membagi tugas berdasarkan keahlian.
- Pengukuran Kinerja: Menggunakan indikator untuk mengevaluasi efisiensi.

Prinsip utamanya adalah menemukan "one best way" (cara terbaik) untuk menyelesaikan pekerjaan dengan biaya minimal dan waktu yang singkat.

1. Manajemen Publik Klasik

A. Efficiency Drive

.Contoh di Indonesia

- Reformasi Birokrasi:

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, seperti penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan secara online, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

- Program e-Government:

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, seperti e-KTP, e-Budgeting, dan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi

1. Manajemen Publik Klasik

B. Downsizing (Penataan Ulang Organisasi)

Downsizing adalah upaya mengurangi ukuran birokrasi dengan cara:

- Menghapus posisi atau unit yang dianggap tidak diperlukan.
- Menyederhanakan struktur organisasi.
- Meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya operasional.

Tujuannya adalah menciptakan organisasi yang lebih ramping, cepat, dan responsif.

1. Manajemen Publik Klasik

B. Downsizing (Penataan Ulang Organisasi)

Contoh di Indonesia

- Reformasi Struktural di Kementerian dan Lembaga:

Pada era reformasi, pemerintah Indonesia melakukan penataan ulang struktur organisasi kementerian dan lembaga. Misalnya, penggabungan beberapa kementerian atau penghapusan direktorat yang dianggap tumpang tindih.

- Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS):

Pemerintah melakukan program rasionalisasi jumlah PNS dengan mengurangi rekrutmen di instansi yang dianggap kelebihan pegawai dan meningkatkan efisiensi melalui program pensiun dini.



Manajemen Publik Klasik (Lanjutan)

C. In Search of Excellence (Mencari Keunggulan)

Gerakan ini dipopulerkan oleh Tom Peters dan Robert Watermandalam buku In Search of Excellence (1982). Fokusnya adalah pada:

- Budaya Organisasi: Menciptakan nilai-nilai inti yang kuat.
- Kepemimpinan: Pemimpin yang visioner dan inspiratif.
- Inovasi: Mengembangkan produk, layanan, atau proses baru.
- Fokus pada Pelanggan: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Prinsip utamanya adalah organisasi yang unggul harus memiliki komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan.



Manajemen Publik Klasik (Lanjutan)

C. In Search of Excellence (Mencari Keunggulan)

. Contoh di Indonesia

– Program Zona Integritas:

Pemerintah Indonesia mencanangkan program Zona Integritas untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih, transparan, dan melayani dengan baik. Instansi yang berhasil mencapai standar ini diberi predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi" (WBK) atau "Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani" (WBBM).

– Inovasi Pelayanan Publik:

Contohnya adalah inovasi pelayanan di **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang menyediakan layanan mobile untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.



Manajemen Publik Klasik (Lanjutan)

D. Public Service (Pelayanan Publik)

Public service menekankan pada nilai-nilai pelayanan publik dan tanggung jawab moral birokrat.

Fokusnya adalah:

- Etika: Birokrat harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
- Akuntabilitas: Bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan yang diambil.
- Kepentingan Umum: Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Prinsip utamanya adalah birokrat sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa.



Manajemen Publik Klasik (Lanjutan)

D. Public Service (Pelayanan Publik)

. Contoh di Indonesia

– Program Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):

PTSP adalah inisiatif pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dan pelayanan publik. Masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan di satu lokasi, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

– Gerakan Revolusi Mental:

Program ini bertujuan mengubah mindset birokrat agar lebih melayani, bersih, dan profesional. Contohnya adalah pelatihan etika dan integritas bagi PNS.

– Layanan Kesehatan Gratis (BPJS Kesehatan):

Pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin melalui program BPJS Kesehatan, mencerminkan komitmen untuk melayani kepentingan umum.



2. New Public Management (NPM)

Desentralisasi

Memberikan kewenangan lebih besar kepada unit-unit lokal, seperti otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Privatisasi

Menyerahkan sebagian fungsi pemerintah kepada sektor swasta, seperti privatisasi BUMN dan kerjasama pemerintah-swasta (KPS).

New Public Management (NPM) – Lanjutan



1

Manajemen Berbasis Kinerja

Fokus pada hasil (outcome) daripada proses (output), seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2

Orientasi pada Pelanggan

Memandang masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik, seperti Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3

Penggunaan Teknologi Informasi

Meningkatkan efisiensi melalui teknologi informasi, seperti Sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi layanan publik.

3. Governansi Publik

Partisipasi

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti Musrenbang.



Transparansi

Memastikan keterbukaan informasi, seperti portal informasi publik.

Akuntabilitas

Bertanggung jawab kepada masyarakat, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



Governansi Publik – Lanjutan



Keadilan

Memastikan kebijakan publik memberikan manfaat yang adil, seperti Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).



Efektivitas dan Efisiensi

Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti Program Dana Desa.



Kolaborasi Multi-Stakeholder

Melibatkan berbagai pihak, seperti penanganan bencana alam.

Kesimpulan

Setiap model manajemen publik memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Manajemen publik klasik fokus pada efisiensi dan hierarki, NPM mengadopsi prinsip-prinsip bisnis, dan governansi publik menekankan kolaborasi dan partisipasi. Pemahaman tentang model-model ini penting untuk merancang strategi manajemen publik yang efektif dan relevan dengan konteks saat ini.

